PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

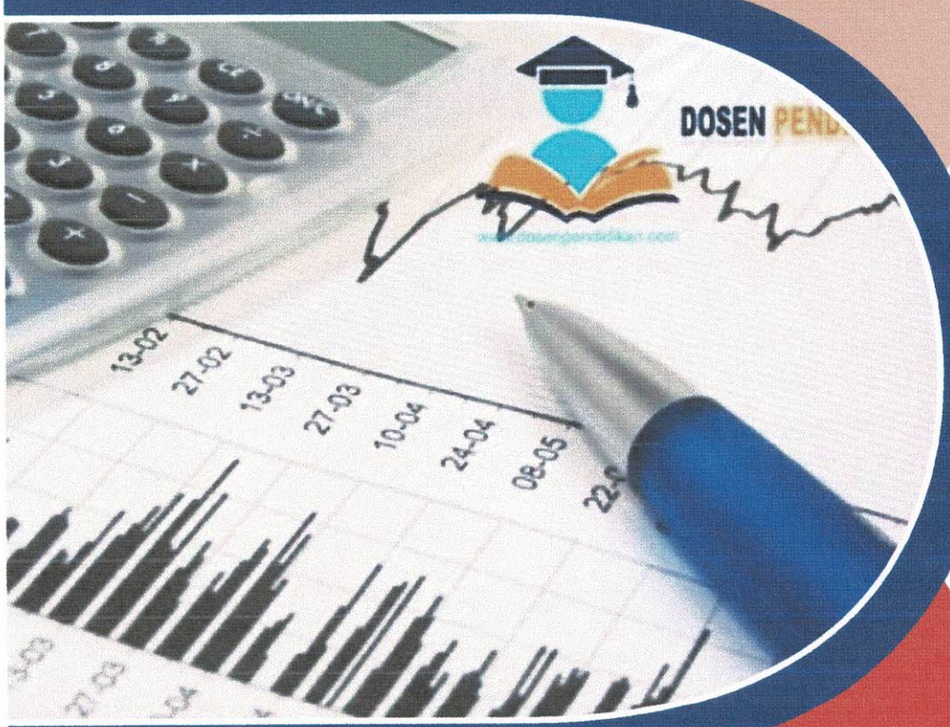

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

KECAMATAN KENOHAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenohan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Kecamatan Kenohan Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2022-2026 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Kenohan Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Kenohan Semoga LKjIP Kecamatan Kenohan ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Kenohan, Pebruari 2023

Camat Kenohan,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN KENOHAN

H. KASPUL, SE, M.Si

NIP. 19680409 198903 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenohan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Kenohan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022		PERSENTASE
				TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	100%
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	80	100%

		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Nilai	35	35	100%
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100	0	0%
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100%
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100%
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	3	3	100%
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun	Pesen	100	100	100%

		2022)				
		Tingkat Kepatuhan Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100%
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100%
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B)	60-70	
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100%
4	Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100%

5	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100%
6	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	4
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	5
	E. Sumber Daya Aparatur	6
	F. Sumber Daya Keuangan	8
	G. Isu-Isu Strategis	8
	H. Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	9
	A. Perencanaan Kinerja	
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	9
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	12
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
	B. Perjanjian Kinerja	17
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2022	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A. Pengukuran Kinerja	22
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	26
	1 Analisis Kinerja Sasaran 1	26
	2 Analisis Kinerja Sasaran 2	29
	3 Analisis Kinerja Sasaran 3	39
	4 Analisis Kinerja Sasaran 4	39
	5 Analisis Kinerja Sasaran 5	40
	6 Analisis Kinerja Sasaran 6	40
	C. Realisasi Anggaran	41
BAB IV	PENUTUP	49

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Kenohan dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

(1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan KenohanTahun 2022-2026;
(2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan KenohanTahun 2022;
(3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kenohan Tahun 2022; dan
(4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat KenohanTahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kenohan Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kenohan
2. Mendorong Kecamatan Kenohan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kenohan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Kenohan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kecamatan Kenohan masuk dalam zona Pedalaman Sungai Belayan yang terletak diantara 115°57' -116°33' Bujur Timur dan 0°11' Lintang Utara - 0°12 Lintang Selatan. Kecamatan Kenohan dilalui oleh satu sungan besar yaitu Sungai Belayan yang mengalir dari Desa Lamin Telihan di hulu sungai hingga Desa Semayang di hilir sungai dengan lebar sungai antara 15-150 Meter dan Kedalaman 3-10 Meter. Dari sungai tersebut terdapat pula satu anak sungai yaitu Sungai Kahala dengan Kedalaman 3-4 Meter dan Lebar 2-6 Meter. Selain iti terdapat juga

Tiga Danau yaitu Danau Semayang (2.593 Hektar), Berambai (1.322 Hektar) dan Rabok (973 Hektar).

Kecamatan Kenohan secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara: Kembang Janggut, Sebelah Timur: Muara Kaman, Sebelah Selatan: Kota Bangun, Sebelah Barat: Kutai Barat

Luas Kecamatan 1.319,85 Km^2, Secara administratif Kecamatan Kenohan terdiri atas 9 desa.

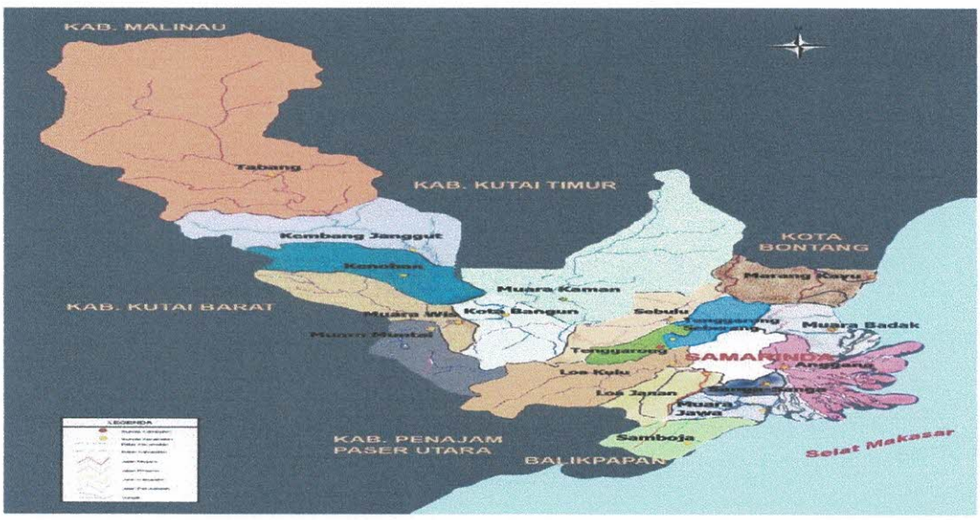

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Kenohan

Dengan luas wilayah desa di kecamatan Kenohan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kenohan

No	Nama Desa	Luas (Km^2)	Jarak Tempuh (Km^2)
1	Semayang	106,59	43
2	Tubuhan	93,71	30,9
3	Teluk Muda	66,52	35,1
4	Tuana Tuha	140,17	10,5
5	Kahala	152,52	0,5
6	Teluk Bingkai	82,61	18,2
7	Lamin Pulut	99,3	15,3
8	Lamin Telihan	5,043	62,9
9	Kahala Ilir	74,13	2
TOTAL		**1.319,85**	

Sumber Data: Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah penduduk mencapai 13.222 jiwa (sensus 2022), dan berdasarkan perekaman data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bulan Januari s/d Desember tahun 2022 sebanyak 5.327 jiwa. Adapun persebaran jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara per kecamatan:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Kenohan Tahun 2022

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Semayang	755	690	1445
2	Tubuhan	959	883	1842
3	Teluk Muda	408	381	789
4	Tuana Tuha	1448	1254	2702
5	Kahala	1023	911	1934
6	Teluk Bingkai	553	489	1042
7	Lamin Pulut	260	245	505
8	Lamin Telihan	958	800	1758
9	Kahala Ilir	616	589	1205
JUMLAH		**6.980**	**6.242**	**13.222**

Sumber Data: DKB Tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KENOHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

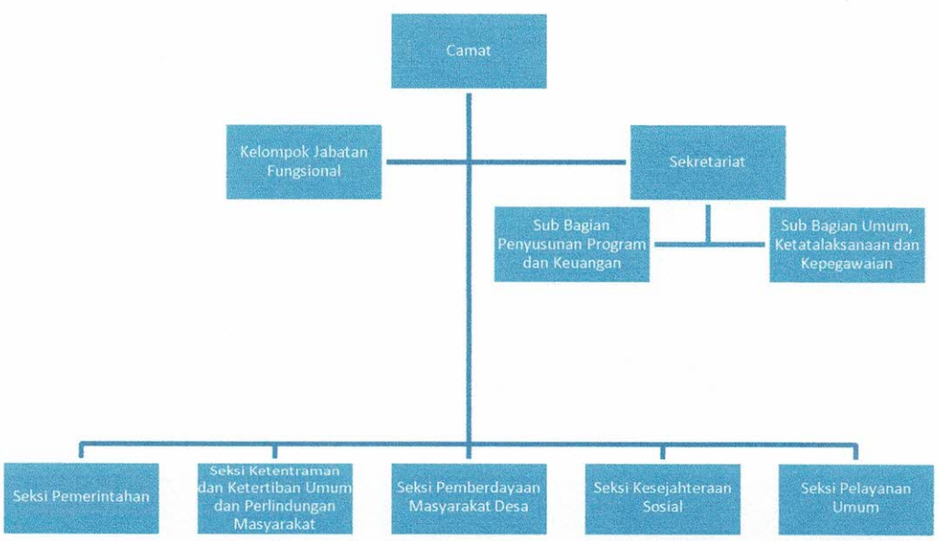

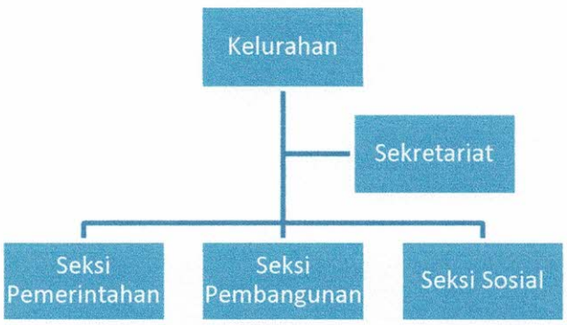

Pembentukan Kecamatan Kenohan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
   a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kelurahan membawahkan :
   a. Sekretaris;
   b. Seksi Pemerintahan;
   c. Seksi Pembangunan; dan
   d. Seksi Sosial.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Kenohan per 31 Desember 2022 sebanyak 24 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.5. PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	0	0	0	0,00 %
2	SLTP	0	0	0	0,00 %
3	SLTA	13	1	14	53,85 %
5	D-I	0	0	0	0,00 %
6	D-II	0	0	0	0,00 %
7	D-III	0	1	1	3,85 %
8	D-IV	0	0	0	0,00 %
9	S1	8	0	8	38,46 %

10	S2	1	0	1	3,85 %
11	S3	0	0	0	0,00 %
	Jumlah	22	2	24	100,00 %

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.6. PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	0	0	0	0,00 %
2	II	12	2	14	57,69 %
3	III	7	0	7	38,46 %
4	IV	3	0	3	3,85 %
	Jumlah	22	2	24	100 %

c. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.7. PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	3,85 %
2	II.b	1	0	1	4,17 %
3	II.c	5	0	5	20,83 %
4	II.d	6	2	8	33,33 %
5	III.a	1	0	1	4,17 %
6	III.b	2	0	2	8,33 %
7	III.c	0	0	0	0,00 %
8	III.d	4	0	4	16,67 %
9	VI.a	3	0	3	12,50 %
	Jumlah	22	2	24	100,00 %

d. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.8. PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Struktural	0	0	0	0,00 %
2	Fungsional Guru	0	0	0	0,00 %
3	Fungsional Non Guru	7	0	7	100 %
4	Pelaksana	0	0	0	0,00 %
	Jumlah	7	0	7	100,00 %

F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kenohan pada Tahun 2022 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kenohan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **8.557.944.438,00** yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 4 (empat) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Adapun isu strategis Kecamatan Kenohan ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari RPJM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan OPD maka rumusan isu strategis dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya predikat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan.
2. Rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
3. Pelayanan belum optimal dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana.
4. Aksebilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kenohan yang masih rendah.
5. Belum meratanya kuantitas dan kualitas sarana prasarana di wilayah perdesaan.

H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab IV Penutup Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kenohan merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kenohan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Kenohan telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, dan setelah melakukan evaluasi terhadap Renstra Tahun 2021 – 2026 sehingga Kecamatan Kenohan menyusun Renstra Perubahan Tahun 2021-2026.

Renstra perubahan ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 **"Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan".**

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Kecamatan Kenohan mengampu **Misi pertama** dan **Misi kelima** yang terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Insikator Sasaran
1.	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja
				Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB)
2.	Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah (Kabupaten)	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Kenohan berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja;
b. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indikator Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB);
c. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah dengan indikator Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Kenohan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kenohan adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

b. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kenohan, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kenohan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	83,67	85	85	85	85	85
			Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang ditindaklanjuti	Nilai	75	75	75	75	75	75

			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Khusus Kecamatan yang memiliki Desa)	Persen	80	80	80	80	80	80
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan		100	100	100	100	100	100

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kenohan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kenohan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di

			kecamatan tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan
			Meningkatkan Pemeliharaan PrasaranadanSaranaPelayanan Umum
			Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penerapan dan PenegakanPeraturanDaerahdan Peraturan Kepala Daerah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2. 4. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

			Pemerintahan Daerah	
	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa

				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Kenohan Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenohan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75
		2	Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Nilai	35

		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		2	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		3	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	3
		4	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		5	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		6	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		7	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70

3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	1	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
5	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	1	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2
6	Tereasliasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	1	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

C. Alokasi Anggaran Tahun 2022

Pada tahun Anggaran 2022, Kecamatan Kenohan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar ***Rp. 8.557.944,438,00*** Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2022 yang bersumber dari APBD meningkat/menurun sebesar Rp. ***2.468.099.155,00***

Tabel 2. 6. Alokasi Anggaran Kecamatan Kenohan Tahun 2022

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	**Rp. 6.089.845.283,00**	**Rp. 8.557.944.438,00**	**Rp. 2.468.099.155,00**

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Kenohan Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Kenohan Tahun 2022

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp. 6.089.845.283,00	Rp. 8.557.944.438,00	Rp. 2.468.099.155,00
Belanja Modal	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Total	Rp. 6.089.845.283,00	Rp. 8.557.944.438,00	Rp. 2.468.099.155,00

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2022, Kecamatan Kenohan mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2. 8. Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Rp. 6.089.845.283,00	Rp. 8.557.944.438,00	Rp. 2.468.099.155,00
Total	**Rp. 6.089.845.283,00**	**Rp. 8.557.944.438,00**	**Rp. 2.468.099.155,00**

3. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Kenohan Tahun 2022 merencanakan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2. 9. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
A.	***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Rp. 5.143.845.283,00***	***Rp. 4.986.944.438,00***	***Rp. (156.900.845,00)***
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 47.325.000,00	Rp. 47.325.000,00	Rp. 0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.231.026.746,00	Rp. 4.074.125.901,00	Rp. (156.900.845,00)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 34.200.000,00	Rp. 34.200.000,00	Rp. 0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 129.436.234,00	Rp. 129.436.234,00	Rp. 0,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 501.857.303,00	Rp. 501.857.303,00	Rp. 0,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00
B	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***	***Rp. 610.000.000,00***	***Rp. 3.210.000.000,00***	***Rp. 2.600.000.000,00***
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 610.000.000,00	Rp. 3.210.000.000,00	Rp. 2.600.000.000,00
C	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	***Rp. 316.000.000,00***	***Rp. 341.000.000,00***	***Rp. 25.000.000,00***
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 316.000.000,00	Rp. 341.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
D	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Rp. 20.000.000,00***	***Rp. 20.000.000,00***	***Rp. 0,00***
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00
	Total	**Rp. 6.089.845.283,00**	**Rp. 8.557.944.438,00**	**Rp. 2.468.099.155,00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Kenohan Tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Capaian = 1 + \frac{Target - Realisasi}{Target} X\ 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal.** Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatandan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kenohan atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2022 yang terdiri dari 6 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kenohan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti	Persen	75	75	100%	Sangat Berhasil
		2	Persentase Capaian Ketentraman	Persen	80	80	100%	Sangat Berhasil

			dan Ketertiban Umum					
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Nilai	35	35	100%	Sangat Berhasil
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100	0	0%	Kurang Berhasil
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		6	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		7	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	3	3	100%	Sangat Berhasil
		8	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksumal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 dan maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		9	Tingkat Kepatuhan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		10	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		11	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	65	76,92%	Cukup Berhasil

3	Meningkatkan Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	12	Persentase Keterisian Data Diaplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
4	Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	13	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100%	Sangat Berhasil
5	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya	14	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100%	Sangat Berhasil
6	**Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang**	**15**	**Capaian Output Kegiatan**	**Persen**	**100**	**100**	**100%**	**Sangat Berhasil**

Berdasarkan Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 Kecamatan Kenohan memiliki 6 (enam) sasaran dan 15 (lima belas) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2022 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2022, Kecamatan Kenohan memiliki 6 (enam) sasaran dan 15 (lima belas) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Capaian kinerja ≥ 95 % kategori "sangat berhasil" sebanyak 13 Indikator, atau 100%;
b) Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori "berhasil" sebanyak 0 Indikator, atau 0,00%;
c) Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori "cukup berhasil" sebanyak 1 Indikator, atau 76,92%; dan
d) Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori "kurang berhasil" sebanyak 1 Indikator, atau 0,00%.

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: "Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan"

1) Indikator Kinerja ke-1 (Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti)

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2022 yaitu 75% dan realisasinya sebesar 83,55%, sehingga capaian target kinerja tercapai sebesar **111,40%** dengan predikat **Sangat Berhasil**. Dalam pencapaian target ini tentunya juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, lalu perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten. Tentunya beberapa kendala ini dapat ditangani sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal, hasil ini dapat diklaim berhasil atau tercapai oleh Kecamatan Kenohan yaitu dengan tidak adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2022.

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kenohan Tahun 2022

Tabel 3.3. Realisasi Indikator Sasaran Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kenohan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian

1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kenohan	Nilai	75	83,55	111,40%

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,000
U2	Prosedur Pelayanan	3,000
U3	Kecepatan Pelayanan	2,983
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4,000
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,000
U6	Kompetensi Petugas	3,000
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,000
U8	Penanganan Pengaduan	2,923
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,940

IKM UNIT PELAYANAN : 83,55

Mutu Pelayanan : Baik

IKM Unit Pelayanan ini berdasarkan rekap keseluruhan dari 10 IKM layanan yang ada di Kantor Camat Kenohan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS LAYANAN	SKOR IKM	TARGET	PERSENTASE (%)	Jumlah Responden
1	Akte Kelahiran	82,46	75	109,95	7
2	Pembuatan AK1	87,34	75	116,45	61
3	Pembuatan KK	83,94	75	111,92	16
4	Pembuatan KTP	83,99	75	111,99	75
5	Pengantar SKCK	80,48	75	107,31	28
6	Perbaikan KK	87,19	75	116,25	57
7	Perbaikan KTP	85,16	75	113,55	16
8	Rekom APBDes	80,08	75	106,77	49
9	SUKET Lainnya	81,59	75	108,79	15
10	Surat Keterangan Pindah	83,25	75	111,00	22
	Jumlah Responden				**346**
	RATA-RATA IKM	83,55	75	111,40	
	Tertinggi	80,48			
	Terendah	78,39			

Dengan jumlah total responden 346 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai usia <18 sampai 50 Tahun

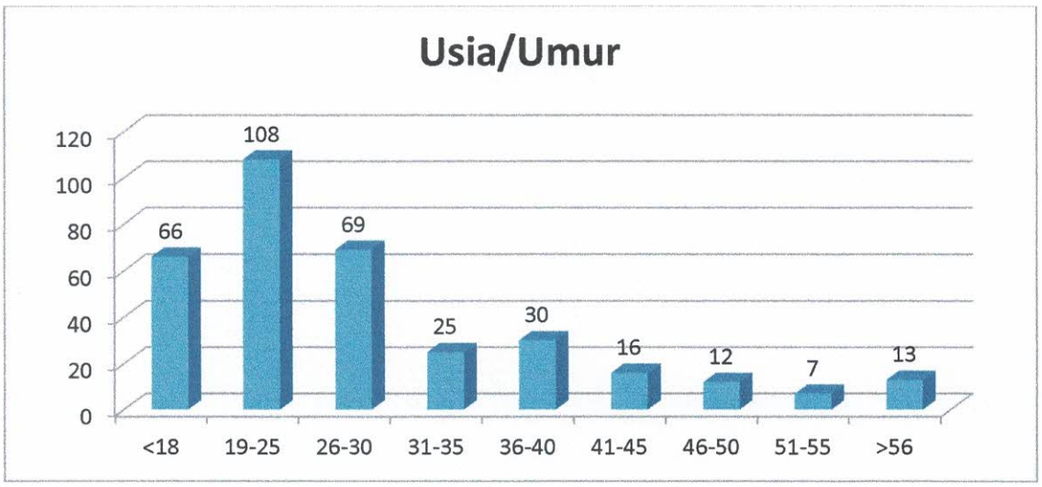

1. Jenis layanan tertinggi adalah Pembuatan AK.1, dengan Skor IKM sebesar **87,34** dan persentase **116,45%** dan jumlah responden 61 orang

2. Jenis layanan terendah adalah Rekomendasi APBDes, dengan skor IKM sebesar **80,08** dan persentase **106,77%** dan jumlah responden 49 orang

Walaupun demikian jika dilihat berdasarkan target IKM sebesar **75**, pencapaian yang didapatkan sudah melebihi target dan mendapatkan mutu pelayanan pada kategori **BAIK**

2) Indikator Kinerja Ke-2 (Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2022 yaitu 80% dan terealisasi sebesar 80%. Capaian kinerja pada indikator ke-2 sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Berhasil**. Hasil ini diperoleh dari selama Tahun 2022 yang dilaporkan oleh bagian trantib terjadi 3 kasus gangguan keamanan dan semua kasus bisa dimediasi dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan terselesaikan dengan baik. Adapun kendala yang cukup menggangu yaitu kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib.

3) Indikator Kinerja Ke-3 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa)

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada diwilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. ntuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang

berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Target kinerja pada indikator ke-3 di tahun 2022 yaitu sebesar 35% dan untuk realisasinya sebesar 30%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **85,71%** dengan predikat **Berhasil**.

4) Indikator Kinerja Ke-4 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan)

Target kinerja pada indikator ke-4 di tahun 2022 yaitu sebesar 100% dan untuk realisasinya sebesar 0%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **0%** dengan predikat **Kurang Berhasil**. Tidak tercapainya target disebabkan kurangnya sosialisasi dari Badan atau dinas terkait kepada masyarakat akan pajak dan retribusi daerah.

2. Analisis Kinerja Sasaran 2: "Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah"

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah diukur dengan 7 (tujuh) indikator yaitu sebagai berikut:

2.1 Predikat Akuntanbilitas Kinerja Kecamatan Kenohan

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Predikat Akuntanbilitas Kinerja Kecamatan Kenohan	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah

Tabel 3.5. Realisasi Indikator Sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntanbilitas Kinerja Kecamatan	Persen	100	100	100

Kecamatan Kenohan	Kenohan

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja "Predikat Akuntanbilitas Kinerja Kecamatan Kenohan" tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indikator ini tidak dapat dilakukan pengukuran karena di

tahun 2022 Kecamatan Kenohan tidak dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

Walaupun Tahun 2022 di Kecamatan Kenohan tidak dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah, tetapi kewajiban perangkat daerah terhadap pemenuhan dokumen-dokumen terkait Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan, seperti Menyusun Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Pemenuhan atas kewajiban tersebut dapat dilihat dalam Aplikasi https://sakip.kukarkab.go.id/.

2.2 Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut mencapai **100%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Jumlah Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat yang telah ditindak lanjuti perangkat daerah
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil temuan BPK/ Inspektorat

Tabel 3.7. Realisasi Indikator Sasaran Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut Tahun 2022

No.	Sasaran		Satuan	Tahun 2022

		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Persen	100	100	100%
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka Wajib untuk ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100%

2.3 Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran mencapai **100%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Hasil tindak lanjut perangkat daerah dalam menyampaikan perbaikan laporan hasil inventarisasi BMD tahun 2018-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.9. Realisasi Indikator Sasaran Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penulusuran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100%

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kenohan Khususnya dalam Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran sudah di tindaklanjuti dalam penelusuran dan perbaikan.

2.4 Pengamanan Bidang Tanah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah mencapai **100%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Rumusan dari indikator Pengamanan Bidang Tanah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Pengamanan Bidang Tanah	Perhitungan dalam kertas kerja komponen pengamanan tanah oleh Bidang Aset BPKAD.

Tabel 3.11. Realisasi Indikator Sasaran Pengamanan Bidang Tanah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %

1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	3	3	100%

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data aset tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Kenohan mengelola 3 (tiga) tanah bangunan seperti data pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12. Data Tanah Kecamatan Kenohan

No	Bidang Tanah	Alamat	Luas (M^2)	Status	Pemanfaatan/ Penggunaan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jalan Baru Kecamatan Kenohan	3.675	SPHAT	Kantor Camat Kenohan
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	Jalan Baru Kecamatan Kenohan	720	SPHAT	Rumah Dinas Staf
3	Tanah Bangunan Balai Nikah	Jalan Baru Kecamatan Kenohan	480	Sudah Bersertifikat	Balai Nikah

DARI KETIGA (3) BIDANG TANAH INI DUA (2) SUDAH BERSTATUS SPHAT DAN SATU (1) BIDANG TANAH (BALAI NIKAH) SUDAH BERSERTIFIKAT.

2.5. Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas

Kinerja Pembangunan" dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) mencapai **100,00%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Kesesuaian Anggaran Belanja SIPD Dan Isian Data RUP, per Tanggal 30 Maret 2022 Pukul 12:15 Wita.

Tabel 3.14. Realisasi Indikator Sasaran Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian

1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100%

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Dalam Penginputan Rencana Umum Pengadaan pada Alikasi Sirup Kecamatan Kenohan sudah dilakukan tepat waktu setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja dan setelah kesepakatan RAPBD tahun 2022.

2.6. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 mencapai **100%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Rumusan dari indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15.Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Report Penyampaian LHKPN dari Aplikasi e-LHKPN.

Tabel 3.16. Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100%

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

DARI JUMLAH ASN KECAMATAN KENOHAN SEBANYAK 8 ORANG SUDAH MELAPORKAN LHKPN TEPAT WAKTU.

2.7. Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 mencapai **100%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17. Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Report Penyampaian LHKASN, data kepatuhan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.18. Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022

				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100%

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

DARI JUMLAH ASN KECAMATAN KENOHAN SEBANYAK 18 ORANG SUDAH MELAPORKAN LHKASN TEPAT WAKTU.

1.1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah mencapai **76,92%** dan termasuk predikat **"Cukup Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19. Pengukuran Kinerja dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Hasil Audit Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.20. Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat	Predikat	Baik (B) 60-70	65	76,92%

	akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Daerah				

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Untuk Tata Kelola arsip di Kecamatan Kenohan untuk Kedepannya akan dilakukan perbaikan untuk mencapai target yang diinginkan.

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.21. Program dan Anggaran Sasaran Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.986.944.438,00	3.901.841.155,00	78,24
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	3.210.000.000,00	3.208.042.266,00	99,94
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	341.000.000,00	316.162.500,00	92,72
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	20.000.000,00	10.850.000,00	54,25
TOTAL		**8.557.944.438,00**	**7.436.895.921,00**	**86,90**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tahun 2022 adalah ***Rp. 7.436.895.921,00*** dari anggaran sebesar **Rp.8.557.944.438,00**. Realisasi keuangan sebesar 86,90% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 76,92%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih tinggi dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran telah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMRAL yaitu Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, harus terhenti dengan adanya Aplikasi SIPD, sementara pelaksanaan aplikasi tersebut belum optimal pelaksanaannya maupun pengintegrasiannya dengan aplikasi internal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Masih terdapat ketidak selarasan pada dokumen perencanaan tingkat kecamatan dengan dokumen perencanaan tingkat kabupaten.

3. Pencapaian kinerja perangkat daerah tidak seluruhnya berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.
4. Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja belum optimal, baik dalam proses pengintegrasian sistem maupun sebagai sarana monitoring dan evaluasi, serta belum adanya pelaksanaan pemberian rewards and punishment atas capaian kinerja, namun upaya pengintegrasian sistem serta proses monitoring dan evaluasi segera bisa diwujudkan dalam upaya meningkatkan kualitas pengumpulan data kinerja .

3. Analisis Kinerja Sasaran 3 : "Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah"

1) Indikator Kinerja ke-12 (Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar)

Indikator kinerja ke-12 yaitu Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar, yang mana target pada tahun 2022 sebesar 100%. Target keterisian data pada aplikasi Becik Kecamatan Kenohan yaitu sudah **100%** sehingga target pada indikator ini mendapat kriteria **Sangat Berhasil.** Hasil laporan keterisian data Becik bisa dilihat pada link https://becik.kukarkab.go.id adapun hasil pelaporan bisa dilihat pada gambar berikut :

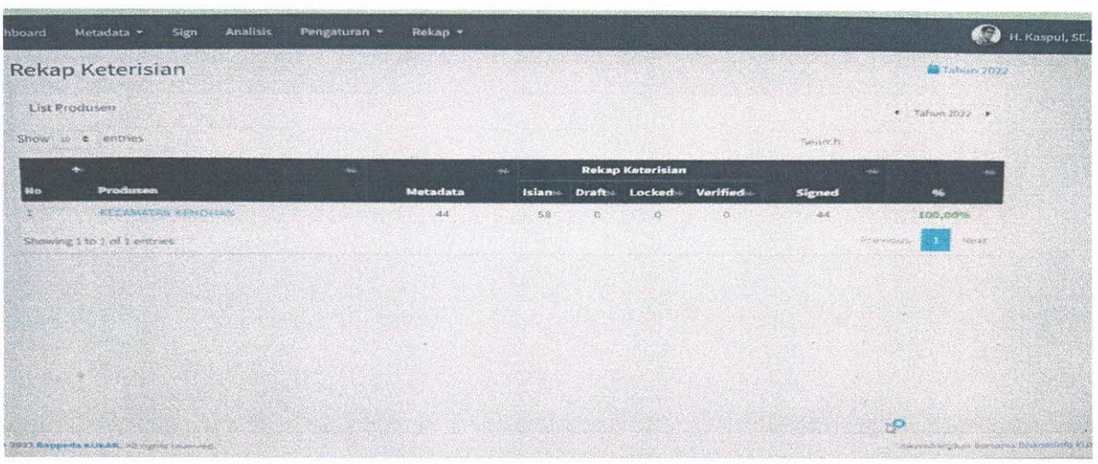

4. Analisis Kinerja Sasaran 4 : "Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah"

1) Indikator Kinerja ke-13 (Jumlah Inovasi)

Indikator kinerja ke-13 yaitu Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah sebanyak 1 (satu) inovasi. Untuk tahun 2022 Kecamatan Kenohan sudah membuat atau mengusulkan inovasi sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Berhasil**

5. Analisis Kinerja Sasaran 5 : "Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya"

1) Indikator Kinerja ke-14 (Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS)

Indikator kinerja ke-14 yaitu dengan sasaran Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya. Selama tahun 2022 Tim Pengendali Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kenohan bersama Tim Verifikasi dan Validasi Desa/Kelurahan sudah melakukan verifikasi, monitoring dan rapat pleno penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Laporan pengendalian pun sudah disampaikan sehingga capaian kinerja yang diperoleh oleh Kecamatan Kenohan untuk indikator ke-14 ini sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Berhasil.**

6. Analisis Kinerja Sasaran 6 : "Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang"

1) Indikator Kinerja ke-16 (Capaian Output Kegiatan)

Indikator kinerja ke-16 yaitu Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang. Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 seluruhnya terlaksana dan terealisasi sebesar 100%, tidak ada kegiatan yang menjadi utang atau tidak dapat dilaksanakan. Jadi, untuk indikator terakhir ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Berhasil.**

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ada pada Kecamatan Kenohan dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 86,90%, adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	- Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti - Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**3.210.000.000,00**	**3.208.042.266,00**	**99,94%**	**1.957.734,00**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**3.210.000.000,00**	**3.208.042.266,00**	**99,94%**	**1.957.734,00**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00%	400.000,00

	- Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa - Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	3.200.000.000,00	3.198.442.266,00	99,95	1.557.734,00

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	- Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja - Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran - Pengamanan Bidang Tanah - Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) - Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.986.944.438,00**	**3.901.841.155,00**	**78,24 %**	**1.085.103.283,00**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**47.325.000,00**	**21.600.000,00**	**45,64 %**	**25.725.000,00**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.800.000,00	8.400.000,00	50,00 %	8.400.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00 %	400.000,00

	LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 - Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 - Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.525.000,00	3.600.000,00	17,54 %	16.925.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.074.125.901,00**	**3.109.161.218,00**	**76,31 %**	**964.964.683,00**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.991.613.901,00	3.037.221.218,00	76,09 %	954.392.683,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	82.512.000,00	71.940.000,00	87,19 %	10.572.000,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	**100 %**	**0,00**

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.200.000,00	34.200.000,00	100 %	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**129.436.234,00**	**101.471.907,00**	**78,40 %**	**27.964.327,00**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.971.907,00	99,72 %	28.093,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.280.000,00	0,00	0,00 %	2.280.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.156.234,00	91.500.000,00	99,29 %	656.234,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	0,00	0,00 %	20.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**501.857.303,00**	**461.540.782,00**	**91,97 %**	**40.316.521,00**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.009,00	2.899.000,00	99,97 %	1.009,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	101.767.092,00	96.92 %	3.232.908,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.983.900,00	99,68 %	16.100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.957.294,00	351.890.790,00	90,47 %	37.066.504,00

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**200.000.000,00**	**173.867.248,00**	**86.93 %**	**26.132.752,00**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	173.867.248,00	86.93 %	26.132.752,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**341.000.000,00**	**316.162.500,00**	**92.72 %**	**24.837.500,00**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**341.000.000,00**	**316.162.500,00**	**92.72 %**	**24.837.500,00**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000,00	19.977.500,00	66.59 %	10.022.500,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	311.000.000,00	296.185.000,00	95.24 %	14.815.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**20.000.000,00**	**10.850.000,00**	**54.25 %**	**9.150.000,00**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**20.000.000,00**	**10.850.000,00**	**54.25 %**	**9.150.000,00**

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000,00	6.100.000,00	61.00 %	3.900.000,00
		Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	10.000.000,00	4.750.000,00	47.50 %	5.250.000,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenohan tahun 2022 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kenohan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima dari Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2021-2026. Kecamatan Kenohan telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022.

Tabel 4. 1. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kenohan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti	Persen	75	75	100%	Sangat Berhasil
		2	Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	80	100%	Sangat Berhasil
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Nilai	35	35	100%	Sangat Berhasil
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100	0	0%	Sangat Berhasil

2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka Wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		6	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		7	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	3	3	100%	Sangat Berhasil
		8	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksumal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 dan maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		9	Tingkat Kepatuhan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		10	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
		11	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B)	60-70	65	76,92%
3	Meningkatkan Pemenuhan Ketersediaan	12	Persentase Keterisian Data	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil

	Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah		Diaplikasi Satu Data Kukar					
4	Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	13	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100%	Sangat Berhasil
5	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya	14	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100%	Sangat Berhasl
6	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	15	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Capaian kinerja ≥ 95 % kategori "sangat berhasil" sebanyak 13 Indikator, atau 100%;
b) Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori "berhasil" sebanyak 0 Indikator, atau 0,00%;
c) Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori "cukup berhasil" sebanyak 1 Indikator, atau 76,92%; dan
d) Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori "kurang berhasil" sebanyak 1 Indikator, atau 0,00%.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 8.557.944.438,00	Rp. 7.436.895.921,00	86,90%
Belanja Modal	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
Total	Rp. 8.557.944.438,00	Rp. 7.436.895.921,00	86,90%

Tabel 4. 2. Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Total Realisasi Belanja Tahun Anggran 2022 sebesar ***Rp. 7.436.895.921,00*** atau ***86,90%*** dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar ***Rp. 8.557.944.438,00***

Demikian Laporan LKjIP Kecamatan Kenohan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, semoga laporan ini memenuhi harapan kita semua terkhusus kami Kecamatan Kenohan.

Camat Kenohan,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KENOHAN

H. Kaspul, SE, M.Si
NIP. 19680409 198903 1 005